

## BAB IV KESIMPULAN , BATASAN DAN ANGGAPAN

### 4.1. Kesimpulan

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah Kab.Banjarnegara sudah mulai menata beberapa kawasan menjadi suatu kawasan perkantoran, perdagangan maupun perkonomian di beberapa titik. Hal ini dilakukan supaya dinamika pembangunan fisik kawasan kota Banjarnegara dapat berkembang secara terencana. Khususnya dengan mengkonsepkan kantor pelayanan publik yang terpadu, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan perancangan perkantoran yang strategis dan ideal untuk kebutuhan publik itu sendiri.

Guna mendukung perkembangan wilayah di Kabupaten Banjarnegara, maka dari itu pemerintah kota melakukan salah satu perencanaan pembangunan gedung baru Kantor pemerintahan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Banjarnegara di mana gedung awal yang berada di Jl. Jenderal A. Yani No. 07, Banjarnegara di pindahkan ke Kawasan Desa Semampir.

Adapun faktor pendukung perencanaan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ini antara lain adalah :

- A. Menurut Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di sekitar kawasan alun-alun pusat kota Banjarnegara. Dimana daerah itu merupakan lokasi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada.
- B. Kondisi bangunan *Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*. saat ini secara existing belum memenuhi kriteria bangunan yang presentatif dan memadai, baik kondisi lahan maupun kebutuhan ruang yang ada, sirkulasi dan hubungan antar bagian dengan bagian yang lain belum terpenuhi secara optimal.
- C. Dibutuhkannya suatu kantor yang dapat memberikan kenyamanan bagi para penggunanya dan suasana kerja yang efisien, serta fleksibel dalam pengaturan ruang sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.
- D. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung perlu direncanakan sebuah kantor yang memiliki kapasitas yang dapat menampung seluruh aktivitas di dalam kantor tersebut dan memiliki tampilan bangunan yang lebih baik, yang dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan faktor Keselamatan, Kenyamanan, Kesehatan dan Kemudahan pengguna.

### 4.2. Batasan

Dalam perencanaan dan perancangan *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil* banyak hal-hal diluar kemampuan dan wewenang perencana. Untuk membantu dan mempertajam pemecahan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan bangunan diperlukan lingkup pembahasan fisik yang dianggap relevan dengan pembahasan, yaitu:

- A. Pembahasan yang dilakukan hanya pada Ruang lingkup disiplin ilmu arsitektur.

- B. Lokasi perencanaan tetap berada di Kabupaten Banjarnegara dengan memperhatikan RTRW Kota Semarang.
- C. Data-data yang tidak bisa didapat, diasumsikan berdasarkan data lainnya yang relevan dengan literature.
- D. Masalah yang tidak menyangkut disiplin ilmu Arsitektur tidak dibahas secara mendalam.

#### **4.3. Anggapan**

- A. RDTRK setempat dianggap tidak mengalami perubahan selama kurun waktu perencanaan dan perancangan.
- B. Peruntukan lahan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirasa sudah tepat. Bangunan kantor yang baru ini pun di harapkan dapat menggunakan energi secara efisien sesuai dengan iklim di mana tapak bangunan tersebut berada.